

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mengemban tanggungjawab ini, Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk baik berupa barang, jasa maupun bangunan infrastruktur.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan tata kelola tersebut, Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan Negara di bidang anggaran. Sistem pengadaan barang dan jasa dibuat dalam rangka memudahkan pemerintah melakukan belanja anggaran dengan lebih efisien, efektif, ekonomis, transparan dan berdaya saing sehat. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal melalui sistem *e-procurement* telah diimplementasikan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Akuntabilitas ini mencakup akuntabilitas administratif dan akuntabilitas profesional. Jaminan akuntabilitas tersebut diindikasikan dengan adanya ketaatan terhadap peraturan, persaingan sehat, transparansi informasi dan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban kepada publik maupun auditor internal dan eksternal.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tegal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, dimana pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*law in action*). Dengan pendekatan ini, penulis melakukan upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan dan selanjutnya menganalisa secara langsung implementasi dilapangan terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Tegal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Kabupaten Tegal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan implementasi kebijakan tersebut mempunyai korelasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tegal.

Kata Kunci : Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

ABSTRACT

In the operation life of the state, the government is always required to promote the general welfare and to fulfill this responsibility, the Government has the obligation to supply the needs of the community in various forms either in the form of goods, services and building infrastructure.

Good governance and clean (Good Governance and Clean Government) are all aspects relating to the control and supervision of the power of the government in carrying out its functions through formal and informal institutions. To implement governance, the Government should implement the principles of accountability and managing resources effectively and efficiently, and ensure the economic and social interaction between the parties (stakeholders) in a fair, transparent, professional and accountable.

Procurement of goods and services is an implementation of the State in the areas of budget implementation. Procurement of goods and services made in order to facilitate the government budget spending more efficient, effective, economical, transparent and competitive healthy. That the Government of Tegal through e-procurement system has been implemented in order to realize the accountability of governance in the region. This accountability includes accountability of administrative and professional accountability. The assurance of accountability is indicated by their adherence to the rules, fair competition, transparency of financial information and accountability to the public areas as well as internal and external auditors.

The purpose of this study was to determine and describe the management of government procurement in accordance with Presidential Decree Number 54 Year 2010 and its amendments as well as how the implementation of the policy on accountability of the regional administration in Tegal

The method used in this research is the socio-juridical, which this approach is done by analyzing the actual state or the real situation that occurs in people with a view to identify and find the facts and data required, which ultimately led to the settlement of the problem (law in action). With this approach, the authors conducted a study or research efforts and further analyze the legal literature is directly related to the implementation in the field of procurement of goods and services in Tegal regency government.

The conclusion from this study is that the procurement policy of the local government Tegal accordance with the legislation and implementation of the policy has no correlation to the accountability of the regional administration in Tegal

Keywords: *Procurement Policy and Government Accountability regional administration.*